

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perkembangan dan hadirnya organisasi sektor publik terus memberikan kesadaran pada masyarakat berkaitan dengan segala kewajiban maupun hak sebagai warga negara serta menjadikan peningkatan terkait aspirasi dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk melayani masyarakat, sektor publik harus memberikan yang terbaik dari segi pelayanan serta pemberian informasi terkait pengelolaan keuangan. Sekarang ini kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar terpenuhinya hak-hak mereka, melainkan juga pelayanan publik yang terbaik. Pemberian pelayanan publik yang tepat dan memadai sangat penting dilakukan karena jika tidak hal tersebut akan berdampak pada munculnya permasalahan sosial (Andhika, 2018).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terus mengupayakan terkait perbaikan mekanisme pengelolaan sehingga menghasilkan sebuah pelaporan yang efektif dan juga efisien. Konsep *good governance* pada dasarnya merujuk pada proses dan pencapaian kinerja anggaran. Dalam konsep *good governance* ini terdapat beberapa karakteristik yaitu, *accountability, transparency, efficiency, effectiveness, equity, responsiveness, and consensus orientation* (Moento, Firman, and Yusuf, 2019). Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa

sektor publik dituntut akuntabel dan transparan terkait apa yang telah dikerjakan karena hal itu akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dirasa sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga pengelola pemerintahan akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akuntabilitas dan Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh instansi atau pemerintahan kepada masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip akuntabilitas yaitu setiap pelaksanaan kegiatan harus diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan, prinsip transparansi artinya seluruh pelaksanaan pemerintahan harus transparan kepada khalayak umum baik dari proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengambilan keputusan (Laoli, 2019). Ketika prinsip ini dilaksanakan dengan baik, maka dapat menjadi cerminan yang luar biasa bagi kinerja anggaran instansi atau pemerintahan tersebut.

Akuntabilitas sendiri menjadi alat serta tolak ukur yang penting bagi kinerja anggaran suatu instansi atau pemerintahan. Pernyataan tersebut didukung oleh riset dari Sari (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan kinerja pemerintahan terdapat keterkaitan antara satu sama lain, dimana jika prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan optimal maka kinerja anggaran akan terlaksana dengan optimal pula.

Pernyataan ini juga didukung oleh Panuntun (2020) yang menyebutkan bahwa jika akuntabilitas mampu dipraktikkan dengan baik maka hal ini mampu meningkatkan kinerja. Setiyanningrum (2017) menyebutkan dalam hasil risetnya terdapat pengaruh yang signifikan dari prinsip akuntabilitas terhadap kinerja anggaran. Riset lainnya yang mendukung pendapat ini seperti yang dilakukan oleh Fernandes, Kennedy, dan Hanif (2015) yang menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada kinerja anggaran dengan konsep *value of money*. Pada dasarnya hubungan kedua variabel ini memunculkan beberapa pendapat seperti ketika suatu instansi atau pemerintahan memberikan tuntutan yang kuat terkait dengan penerapan akuntabilitas maka hasil kinerja yang timbul akan semakin baik.

Prinsip lain yang perlu diimplementasikan dalam instansi atau pemerintahan selain akuntabilitas yaitu transparansi. Penjelasan terkait transparansi sendiri menurut Purnomo (2018) adalah transparansi disebut sebagai alat pengendali kinerja pemerintahan. Dapat dikatakan demikian karena transparansi sendiri secara tidak langsung memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan kinerja yang terbaiknya dengan tujuan agar ketika pihak-pihak berkepentingan memerlukan informasi yang diperlukan dapat melihat bagaimana kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Selain itu, dengan penerapan transparansi menjadikan masyarakat untuk lebih berfikir kritis terkait problem-problem yang ada disekitar mereka. Yuni dan Ovami (2020) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa

transparansi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value of money*. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Veronika dan Nugraeni (2023) yang juga menyimpulkan hal sama yaitu transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan basis *value of money*. Purnomo (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran serta diimplementasikan dengan memadai. Transparansi ini memiliki peranan sangat penting dimana dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait pengelolaan anggaran yang menjadi penentu keberhasilan kinerja anggaran instansi tersebut perlu ketransparanan. Hal ini terjadi karena semakin transparan maka pihak berkepentingan akan lebih mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu tingginya capaian kinerja anggaran tidak luput dari maksimalnya penerapan prinsip transparansi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah dirasa sangat penting. Sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan. Kinerja pemerintah adalah hal yang menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan. Semakin baik kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat (Damayanti, Suwena, dan Haris, 2019). Kepercayaan masyarakat dianggap sangat penting karena disini mereka berperan sebagai pemberi amanah. Sedangkan pemerintah yang

bertugas menjalankan amanah tersebut harus memberikan kontribusi yang terbaik salah satunya dengan menunjukkan kinerja yang baik.

Berkaitan dengan kinerja anggaran di Kota Blitar, yang menjadi perhatian khusus adalah adanya penurunan APBD tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, anggaran APBD Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp 1,1 Triliun, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 1,05 Triliun. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya dana transfer dan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan. Diperlukan beberapa upaya agar hal tersebut tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan seperti halnya terus melakukan evaluasi berkaitan dengan realisasi anggaran dari kegiatan atau program pemerintah. Evaluasi dimaksudkan agar kedepannya dapat diambil langkah yang sesuai agar anggaran dapat terealisasi dengan baik.

Selain permasalahan diatas, juga terdapat penurunan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja yang dihasilkan dibanding tahun sebelumnya. DID adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan pada daerah dengan prestasi kinerjanya. Kinerja aparatur pemerintah Kota Blitar menjadi perhatian setelah adanya hal ini karena penilaian kinerja menjadi sorotan utama oleh khalayak umum.

Beberapa fakta yang telah diangkat, kinerja pemerintah Kota Blitar perlu lebih diperhatikan lagi serta diperlukan beberapa evaluasi yang dapat memperbaiki masalah tersebut. Kinerja yang baik tidak luput dari pentingnya pengawasan terutama kinerja anggaran pada sektor publik. Sektor publik banyak menarik perhatian para pengawas karena sering dianggap sebagai tempat pemborosan serta sumber kerugian (Laoli, 2019). Pemegang peranan penting dalam jalannya kinerja anggaran tidak hanya dari ketatnya pengawasan melainkan juga profesionalisme aparatur dari instansi itu sendiri. Apabila suatu instansi atau pemerintahan memiliki kemampuan profesionalisme aparatur yang baik, tentu kinerja anggaran juga akan berjalan dengan baik.

Perangkat daerah yang merupakan bagian dari sektor publik dalam hal ini yang bertugas sebagai pengelola anggaran daerah diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Sitta, Paulus, dan Hadiprajitno (2023) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perangkat daerah sangat penting dilakukan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang serta kesalahan dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan.

Faktor profesionalisme yang dimiliki aparatur menjadi pendorong motivasi dalam pemberian kontribusi pada kinerja (Amin, 2020). Profesionalisme juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur dalam organisasi pemerintahan. Aparatur memegang peranan dalam menggerakkan organisasi pemerintahan. Diperlukan profesionalisme yang

tinggi untuk mendorong tingginya kinerja pemerintahan. Ketika aparatur memiliki profesionalisme yang baik maka kinerja dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan baik juga, karena pada dasarnya sikap ini dapat membentuk perilaku aparatur dalam pencapaian kinerja yang baik.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh variabel profesionalisme terhadap kinerja. Salah satunya yaitu riset yang dilakukan oleh Amin (2020) yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Indikator tersebut dinyatakan berpengaruh karena pada dasarnya profesionalisme sendiri berasal dari kemampuan masing-masing individu dalam menjalankan tugasnya. Penelitian lain yang mendukung pernyataan tersebut dilakukan oleh Annisa, Sariningsih, dan Luthfi (2020) memberikan kesimpulan yaitu profesionalisme sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintahan. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki aparatur pada suatu instansi tersebut semakin tinggi kinerja manajerial yang dihasilkan.

Berkaitan dengan kinerja anggaran pemerintahan, anggaran adalah bagian penting dari jalannya suatu pemerintahan. Tanpa adanya anggaran akan sulit mencapai tujuan serta visi misi. Oleh karena sangat pentingnya anggaran, tentu diperlukan pengelolaan yang baik dan aparatur pengelola yang profesional. Profesionalisme merupakan salah satu prinsip yang sangat diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan.

Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 , profesionalisme adalah upaya menciptakan pemerintahan baik. Pemerintahan yang baik yang dimaksud adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan maksimal dari segi kinerjanya maupun berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Artinya pemerintah harus profesional dalam memberikan pelayanan yang baik sebagai bentuk cerminan pemerintahan yang baik.

Ketika suatu pemerintahan sudah mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta memiliki tenaga kerja yang profesional, hal tersebut akan berdampak baik pula terhadap kinerja anggaran dari pemerintahan itu sendiri. Pada dasarnya, masyarakat atau khalayak umum akan melihat pada aspek tersebut sebagai alat penilaian kinerja atau pencapaian suatu instansi.

Penelitian ini akan menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh Gede (2023) dengan menggabungkan tiga variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan serta mengganti objek penelitiannya dengan kota yang memiliki permasalahan yang sama berkaitan dengan kinerja. Penelitian menambahkan variabel independent yaitu profesionalisme aparatur pemerintahan karena akuntabilitas dan transparansi harus diimbangi dengan adanya profesionalisme yang dimiliki oleh aparatur tersebut dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan. Dalam bertindak menerapkan akuntabilitas serta transparansi diperlukan

adanya pengetahuan serta pengalaman yang memadai agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan terhadap kinerja anggaran pemerintah Kota Blitar. Objek dari penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota Blitar. Pemilihan Kota Blitar sebagai objek penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab turunnya kinerja pemerintah Kota Blitar. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana peranan aparatur pemerintah daerah Kota Blitar dalam kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan kinerja dalam pemerintahan daerah Kota Blitar.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran Kota Blitar?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran Kota Blitar?
3. Apakah profesionalisme aparatur pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja anggaran Kota Blitar?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus meneliti tiga variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk diuji pengaruhnya terhadap kinerja anggaran di Kota Blitar. Responden yang ditentukan yaitu aparatur pemerintahan yang bertugas mengelola anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Blitar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran Kota Blitar.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme aparatur pemerintahan terhadap kinerja anggaran Kota Blitar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap konsep serta teori mengenai akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang mempengaruhi kinerja anggaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian

selanjutnya mengenai akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan bahan pertimbangan kepada instansi atau perusahaan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan terhadap kinerja anggaran demi perbaikan dan pengembangan instansi yang diteliti. Memberikan tambahan pengetahuan kepada aparatur pemerintahan dalam bekerja untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan turunnya kinerja pemerintah daerah Kota Blitar.

b. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan peneliti dalam bidang penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengelolaan data hingga penyajian laporan yang kemudian dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan serta ilmu yang dipelajari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparatur pemerintahan serta memperluas pengetahuan secara keseluruhan.